

Irjen Remigius yang Lolos Seleksi Komnas HAM Tidak Mewakili Polri

JAKARTA (IM) - Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Remigius Sigid Tri Hardjanto dinyatakan lolos tahapan awal seleksi calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2022-2027.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan, Irjen Remigius tidak ditugaskan secara khusus ataupun mewakili instansi Polri.

"Tidak (mewakili Polri), beliau mendaftar secara personal," kata Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat (3/6).

Dedi menambahkan, Remigius juga akan memasuki masa pensiun pada tahun ini. Selain itu, menurut Dedi, pada saat mendaftar, Remigius juga diwajibkan memenuhi syarat administrasi sama halnya dengan calon peserta lainnya yang mendaftar. "Kebetulan yang bersangkutan akan memasuki masa purna tahun ini. Kalau sudah purna, berarti sudah tidak terikat regulasi internal," ujar Dedi.

Remigius masuk dalam 96 nama yang lolos seleksi administrasi dan 50 nama yang lolos tes tertulis objektif-penulisan makalah. Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM 2022-

2027, Makarim Wibisono sebelumnya menyebutkan, para pendaftar datang dari latar belakang profesi yang beragam.

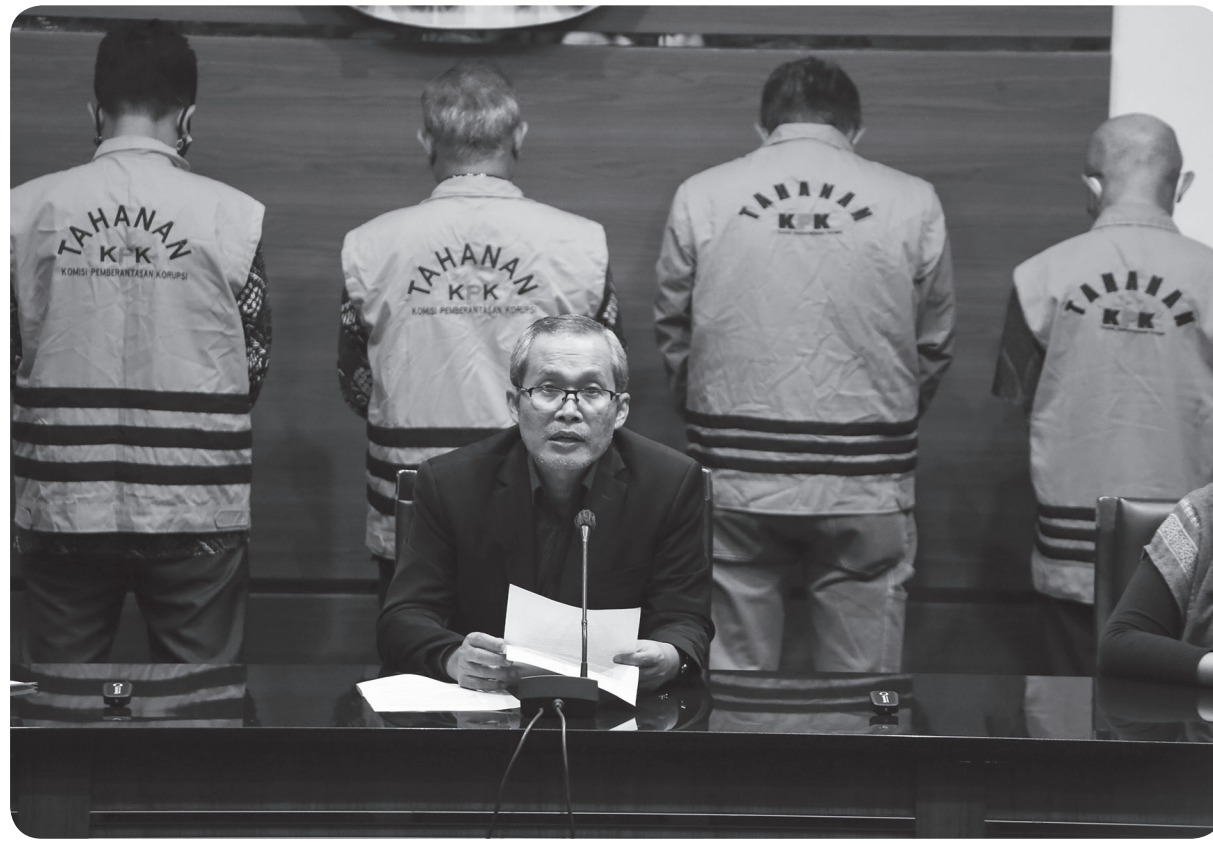
Ia menambahkan, para pendaftar mayoritas berdomisili di Jawa, terutama Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah dan Banten. Namun, ia memastikan terdapat keterwakilan wilayah luar Jawa yaitu Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara Timur, Riau dan Papua.

"Dari profesi para pendaftar, berasal dari kalangan advokat, aktivis, akademisi, pegawai swasta, wirasahawan, aparat sipil negara, dan tenaga kesehatan hingga sejumlah petahana anggota Komnas HAM RI. Ada pula unsur aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, serta purnawirawan Polri dan TNI," ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (18/4) lalu.

Tes tertulis obyektif dan penulisan makalah telah dilaksanakan secara daring pada 13 Mei 2022. Total, ada 6 tahapan dalam seleksi calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Nantinya, akan dilakukan dialog publik, psikotes, tes kesehatan, dan wawancara sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komnas HAM saat ini pada November 2022. • han

2 Polhukam

FOTO/ANT



OTT MANTAN WALIKOTA YOGYAKARTA

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/6). KPK resmi menahan mantan Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti bersama tiga orang lainnya serta mengamankan barang bukti berupa uang sebesar USD27.258 dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Nikahi Adik Jokowi Dituduh Politis, Ketua MK: Dunia Peradilan Penuh Fitnah

Ketua MK Anwar Usman menyebut tuduhan bahwa pernikahannya dengan adik Jokowi politis sangat tidak beralasan.

JAKARTA (IM) - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman akhirnya buka suara atas tuduhan bahwa pernikahannya dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati, adalah tindakan politis.

Anwar mengatakan bahwa tuduhan terhadap pernikahannya ini adalah fitnah. Menurutnya, dunia peradilan yang ia geluti selama ini, memang penuh dengan fitnah dan

caci maki.

"Jangan heran, dunia peradilan, penuh dengan fitnah, penuh dengan caci maki. Tadi saya sampaikan, semakin banyak caci maki fitnah untuk diri saya, semakin banyak insya Allah pahala untuk diri saya," ucap Anwar saat memberikan kuliah umum di Universitas Kupang, dikutip dari YouTube resmi MK, Jumat (3/6).

Ia beranggapan, tuduhan terhadap pernikahannya yang dinilai sebagai tindakan politik tak berasal. Pasalnya, saat berkenalan dengan Idayati, Anwar sama sekali tak tahu mengenai statusnya yang merupakan adik Presiden Jokowi. Selain itu, dirinya juga bukan anggota partai politik.

"Saya tidak kenal kok, demi Allah. Saya kenal Oktober 2021, nggak ada hubungan. Misalnya ada yang menuding nikah dengan beliau ini perkawinan politik. Lah, saya bukan parpol, apa yang saya cari?" ujar Anwar.

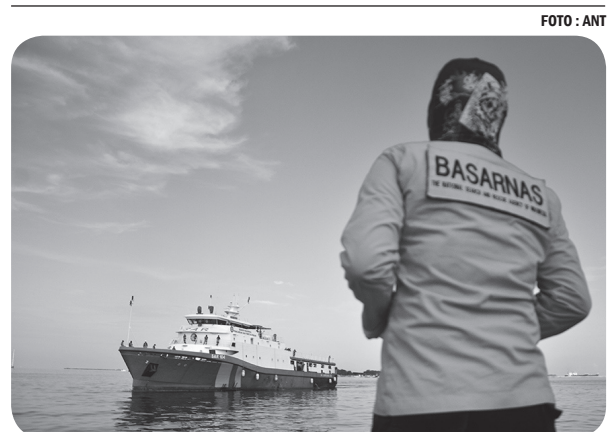
"Saya kadang-kadang ngomong, untuk apa? Pak Jokowi juga tidak bisa lagi ikut Pilpres 2024," ucapnya.

Sebagai informasi, pernikahan antara Anwar Usman dan Idayati berlangsung di Gedung Graha Saba Buana Solo, Kamis (26/5) lalu.

Pernikahan Anwar dan Idayati tersebut memunculkan polemik lantaran sosok Anwar yang merupakan Ketua MK sekaligus status Idayati sebagai adik Presiden Jokowi. Pernikahan tersebut dinilai bisa menimbulkan dampak ketatanegaraan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari. Ia bahkan mendesak Anwar untuk mundur dari jabatannya agar lembaga peradilan tetap memiliki marwah.

"Demi cinta kepada MK dan pujaan hati, harusnya (Anwar) mundur karena potensi konflik kepentingan akan membuat orang berprasangka dengan putusan MK," jelasnya Selasa, (22/3). • han



PENCARIAN KORBAN KM LADANG PERTIWI DUA DIPERPANJANG

KN SAR Kamajaya yang membawa jenazah korban tenggelamnya KM Ladang Pertiwi Dua bersiap sandar di Pelabuhan Peti Kemas, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (3/6). Pencarian korban KM Ladang Pertiwi Dua diperpanjang hingga tiga hari ke depan dan titik pencarian diperluas hingga 40 nautical mile, sementara total korban selamat sebanyak 31 orang, tiga meninggal dunia dan 16 orang masih dalam pencarian.

Terpidana Pembunuh 5 Orang Tidak Ajukan Banding Atas Hukuman Mati

BATURAJA (IM) - Terpidana hukuman mati kasus pembunuhan berantai di Desa Bunglai, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Otori Efendi, dipindahkan ke Lapas Merah Mata Kota Palembang untuk diproses lebih lanjut.

"Ya, terdakwa kami pindahkan ke Lapas Merah Mata," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (OKU) Arma Ramdani di Baturaja.

Pemindahan pemahaman terhadap terdakwa kasus pembunuhan berantai yang menewaskan lima orang korban tersebut karena tidak ada pengajuan upaya hukum atau banding atas vonis mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Baturaja beberapa waktu lalu.

Pada hal, kata dia, terdakwa memiliki waktu selama tujuh hari untuk mengajukan banding setelah pembacaan vonis oleh hakim di pengadilan.

"Karena limit waktu yang telah ditetapkan untuk upaya hukumnya telah habis, maka hari ini terdakwa kami eksekusi dengan memindahkannya ke Lapas Merah Mata di Palembang dan tentunya dengan pengawasan ketat," tegasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Baturaja, Kabupaten OKU menjatuhkan vonis mati terhadap Otori Efendi, terdakwa kasus pembunuhan berantai di Desa Bunglai, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya yang menewaskan lima orang korban pada November 2021.

Dalam persidangan di PN Baturaja pada 24 Mei 2022, Ketua Majelis Hakim Hendri Agustian mengatakan, putusan vonis ini sesuai dengan tuntutan JPU sebelumnya yang menuntut hukuman mati terhadap terdakwa.

Majelis hakim menimbang hal yang memberatkan terdakwa dalam putusan yang dibacakan itu di antaranya perbuatan terdakwa sangat keji, menimbulkan banyak korban jiwa, menyebabkan anak korban menjadi yatim piatu dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

"Sementara hal yang meringankan terdakwa tidak ada. Berdasarkan fakta persidangan terdakwa dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan tindakan pembunuhan berencana dan juga dinyatakan dalam keadaan sehat saat melakukan aksinya," katanya. • mei

Mendagri Dilaporkan ke Ombudsman Terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dilaporkan ke Ombudsman RI atas dugaan malaadministrasi dalam proses penentuan penjabat (pj) kepala daerah yang dianggap tidak transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Laporan dilakukan pada Jumat (3/6) siang oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Kepala Divisi Hukum KontraS, Andi Muhammad Rezaldi, menyebut, malaadministrasi itu berkenaan dengan dugaan penyimpangan prosedur dan pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan oleh Mendagri.

"Kami menilai pengangkatan (penjabat kepala daerah) yang dilakukan berpotensi menghadirkan konflik kepentingan serta melanggar asas profesionalitas sebagai bagian tak terpisahkan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), karena menduduki dua jabatan sekaligus secara aktif," jelas Andi dalam keterangan tertulis, Jumat

(3/6). Ada sedikitnya 6 pelantikan penjabat kepala daerah yang disoroti. Pertama, Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai pj gubernur Banten. Kedua, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamiluddin sebagai pj gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Ketiga, anak buah Tito yang berkedudukan sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, sebagai pj gubernur Sulawesi Barat. Keempat, Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kemerpora, Hamka Hendra Noer, sebagai pj gubernur Gorontalo. Kelima, Deputy Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Kemendagri, Komjen (Purn) Paulus Watpapua, sebagai pj gubernur Papua Barat.

Kemudian yang keenam paling banyak menuai kecamaran, yakni ditunjuknya perwira tinggi TNI aktif, Brigjen Andi Chandra As'Aduddin, sebagai pj bupati Seram Bagian Barat. Sorotan tak terlepas dari fakta bahwa pemerintah hingga sekarang tak menerbitkan ketentuan yang sah tentang mekanisme penunjukkan

penjabat kepala daerah.

Tidak ada transparansi mengenai kriteria yang digunakan pemerintah dalam menyeleksi nama-nama tertentu guna ditempatkan sebagai penjabat kepala daerah sementara menunggu Pemilu Serentak 2024.

"Mendagri dalam hal ini telah menempatkan penjabat kepala daerah secara tidak transparan dan akuntabel," ujar Andi. "Dalam penempatan TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah, (Mendagri) telah menerabas berbagai peraturan perundangan, seperti UU TNI, UU Polri, UU ASN, UU Pemilihan Kepala Daerah hingga dua Putusan Mahkamah Konstitusi," ungkapnya.

Semua ini dianggap sebagai penyimpangan atas prinsip-prinsip demokrasi sekaligus melanggar hukum.

"Atas dasar tersebut, kami meminta Ombudsman RI sesuai tugas dan wewenangnya untuk menerima, memeriksa laporan dan/atau pengaduan secara transparan dan akuntabel, serta menyatakan malaadministrasi tindakan Mendagri dalam menentukan penjabat kepala daerah," ujar Andi. • han



PERSIAPAN LAYANAN JAMAAH CALON HAJI DI BANDARA SOETTA

Petugas mempersiapkan konter pemeriksaan keimigrasian jamaah calon haji untuk musim haji 2022 di Terminal 2 F Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (3/6). Untuk mengurangi antrean jamaah setibanya di tanah suci, PT Angkasa Pura II bekerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi membuka konter imigrasi Arab Saudi di Jakarta untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian jamaah di Bandara Soetta yang akan melayani 29 ribu jamaah calon haji dari 73 kelompok terbang (Kloter).

Kemkominfo Meraih Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman

JAKARTA (IM) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) meraih Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) terkait Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) SDM Kementerian Kominfo Hary Budiarto mengatakan, predikat itu sesuai dengan hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pengawasan publik tersebut.

"Kominfo menyampaikan terima kasih atas penghargaan dari Ombudsman RI. Predikat ini tentunya mendorong kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Hary dalam keterangan tertulis, Jumat (3/6).

Mewakili Menkominfo Johnny G. Plate, Hary juga menjadi Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo menerima penghargaan tersebut dari Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus di Kantor Ombudsman RI Jakarta Selatan pada Kamis (2/6).

Menurutnya, hasil penilaian dari Ombudsman tersebut merupakan apresiasi atas

upaya jajaran Kementerian Kominfo dalam menerapkan standar dan menjalankan administrasi pemerintahan yang baik.

"Hal ini merupakan apresiasi atas upaya Kementerian Kominfo di bawah kepemimpinan Bapak Menteri Johnny G. Plate yang bisa meminimalkan maladministrasi dalam melayani masyarakat," imbuhnya.

Ia menjelaskan saat ini Kementerian Kominfo tengah melakukan upaya pelayanan publik secara daring.

"Pelayanan daring bisa mempercepat dan mempermudah akses masyarakat yang menggunakan layanan Kominfo," ungkapnya.

Sementara itu, Bobby Hamzar Rafinus menyampaikan gagasan tentang penilaian Opini Pengawasan Pelayanan Publik tidak terlepas dari pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada April 2022 lalu.

"Beliau sangat mendukung agar ke depannya setiap instansi pemerintah mendapatkan predikat mengenai kualitas pelayanan publik yang telah diberikan," ujarnya.

Ia mengungkapkan penilaian tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang. • han

Kakak Yusril Ihza Mahendra Pindah ke Partai Demokrat

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor mengaku sudah mengetahui bahwa kakak Ketua Umum PBB Yuslih Ihza Mahendra, pindah ke Partai Demokrat.

Kepindahan Yuslih dari PBB ke Demokrat disebut sudah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu.

"Kita sudah tahu beberapa bulan lalu, saudara Yuslih ke Partai Demokrat. Ini soal pilihan politik pribadi dia," kata Afriansyah, Jumat (3/6).

Afriansyah tak ambil pusing atas kepindahan Yuslih ke Partai Demokrat. Pasalnya, kontribusi Yuslih selama berada di PBB juga tidak terlihat. Padahal, partai itu diklaim telah membesarkannya. "Selama di PBB, dia (Yuslih) juga tidak memberikan kontribusi apa-apa. Sudah dibesarkan PBB, sekarang pindah. Itu soal pilihan dia," jelas Afriansyah.

Lebih lanjut, Afriansyah menilai bahwa pindahannya

Yuslih ke Demokrat tidak membuat PBB kalang kabut. Terlebih, Afriansyah juga beranggapan bahwa PBB akan tetap memiliki kader-kader terbaiknya, meski tidak ada sosok Yuslih.

"PBB tidak kekurangan kader-kader terbaik," tegasnya. Sebelumnya diberitakan, mantan Bupati Belitung Timur, Yuslih Ihza Mahendra memutuskan bergabung dengan Partai Demokrat. Yuslih sebelumnya tercatat sebagai kader PBB.

"Beliau telah resmi memegang Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani dalam keterangannya, Kamis (2/6).

Kamhar menambahkan, Yuslih pindah ke Demokrat karena merasa lebih nyaman dan memiliki prospek yang menjanjikan ke depannya.

"Beliau sendiri memiliki orientasi politik untuk 2024," jelas Kamhar. • mei

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa PT VIRTUS TECHNOLOGY INDONESIA bermaksud untuk mengalihbiarkan seluruh saham yang dimiliki oleh PT ANABATIC DIGITAL RAYA, PT BLUE POWER TECHNOLOGY, PT CENTRAL DATA TECHNOLOGY, PT HELIOS INFORMATIKA NUSANTARA, PT DEFENDER NUSA SEMESTA, PT INOVASI INFORMATIKA INDONESIA, PT EQUINE GLOBAL, PT MEGA BUANA TEKNOLOGI dalam PT JEDI GLOBAL TEKNOLOGI berkedudukan di Jakarta Selatan.

Apabila terdapat pihak-pihak yang berkeberatan atas rencana pengalihan ini dapat mengajukan keberatan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini, kepada:

PT JEDI GLOBAL TEKNOLOGI
Centennial Tower Lantai 12, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta Selatan
Up : Direksi

Demikian pengumuman ini dibuat dan dipublikasikan guna memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 4 Juni 2022

PT ANABATIC DIGITAL RAYA
PT BLUE POWER TECHNOLOGY
PT CENTRAL DATA
PT HELIOS INFORMATIKA NUSANTARA
PT DEFENDER NUSA SEMESTA
PT INOVASI INFORMATIKA INDONESIA
PT EQUINE GLOBAL
PT MEGA BUANA TEKNOLOGI

PT VIRTUS TECHNOLOGY INDONESIA
PT JEDI GLOBAL TEKNOLOGI